MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA

Pengki Dani[1], George M. V. Kawung[2], Wensi F. I. Rompas[3]
[1,2,3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: danifengky03@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan adalah proses multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang merata penting untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, serta memastikan akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya bagi semua individu dan komunitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, mengidentifikasi pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara, serta menguji apakah hipotesis Kuznets tentang "U terbalik" berlaku di Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan data PDRB dari tahun 2013.3 -2022.3, serta jumlah penduduk tahun 2013.3 -2022.3. Teknik analisis yang digunakan meliputi Analisis Tipologi Klassen, Analisis Indeks Williamson, dan Regresi Non Linier. Analisis di Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa peningkatan PDRB Per Kapita secara konsisten mengurangi ketimpangan pendapatan, meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam ketimpangan pada tahun-tahun terakhir. Hipotesis Kuznets tentang pola "U-terbalik" tidak sepenuhnya terkonfirmasi, karena pertumbuhan ekonomi di wilayah ini lebih cenderung menurunkan ketimpangan tanpa melalui fase peningkatan yang signifikan.
Kata Kunci: Ketimpangan, PDRB, Jumlah Penduduk.

ABSTRACT

Development is a multidimensional process aimed at improving societal well-being through economic growth, income distribution, and poverty eradication. Robust economic growth and equitable income distribution are crucial for fostering equality and social justice, as well as ensuring equal access to opportunities and resources for all individuals and communities. The purpose of this research is to identify the economic patterns and structures of regencies/cities in North Maluku Province, to assess the impact of economic development inequality on economic growth in North Maluku Province, and to test whether the Kuznets hypothesis of the "inverted U" applies in North Maluku Province. This study utilizes GDP data from 2013.3 to 2022.3, as well as population data from 2013.3 to 2022.3. The analytical techniques used include Klassen Typology Analysis, Williamson Index Analysis, and Non-Linear Regression. The analysis in North Maluku Province indicates that an increase in GDP per capita consistently reduces income inequality, although there has been a significant rise in inequality in recent years. The Kuznets hypothesis of the "inverted U" is not fully confirmed, as economic growth in this region tends to reduce inequality without going through a significant increase phase.
Keywords: Inequality, GDP, Population.

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 225.66f
DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses multidimensi yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi sosial. Proses ini juga melibatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Tujuan utama

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai peningkatan kesejahteraan ini, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang merata, tanpa adanya disparitas. Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan setiap daerah yang sudah maju. Dengan kata lain, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa setiap individu dan komunitas memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap orang dapat mencapai potensi penuh mereka.

Pertumbuhan ekonomi, sebagai suatu proses peningkatan yang terus-menerus dari waktu ke waktu, memiliki peran penting sebagai indikator dalam mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara. Kemajuan ekonomi ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang mendukung kondisi ekonomi pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian menghasilkan penghasilan dan pendapatan bagi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kesejahteraan (Firmansyah 2021). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi untuk mencapai hasil maksimal menjadi suatu proses penting dalam aktivitas perekonomian. Hal ini membawa dampak positif berkelanjutan terhadap penghasilan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang, menciptakan hubungan linear yang positif antara pertumbuhan jasa dan barang dalam proses produksi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat (Patta 2017). Meskipun demikian, mengukur secara tepat produksi barang dan jasa yang cenderung heterogen merupakan tugas yang kompleks, sehingga diperlukan indikator yang tepat untuk mencapai hasil yang positif terkait pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam cakupan yang sangat luas.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah karena mencerminkan nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan memperhitungkan semua sektor, baik publik maupun swasta, PDRB memberikan gambaran yang komprehensif tentang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Melalui PDRB, pemerintah dan para pengambil kebijakan dapat memantau kinerja ekonomi daerah serta merencanakan kebijakan pembangunan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan". Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, bahkan dapat dikategorikan menjadi faktor terpenting yang mempengaruhinya.

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Provinsi Maluku Utara (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan 2010

Wilayah	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Provinsi Maluku Utara (Juta Rupiah)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Halmahera Barat	Rp 10,485	Rp 10,850	Rp 11,256	Rp 11,623	Rp 12,014	Rp 12,401	Rp 13,100	Rp 11,613	Rp 11,528	Rp 11,651
Halmahera Tengah	Rp 23,542	Rp 22,457	Rp 22,777	Rp 24,593	Rp 25,281	Rp 26,353	Rp 27,829	Rp 35,445	Rp 90,762	Rp 179,620
Kepulauan Sula	Rp 12,928	Rp 13,422	Rp 13,935	Rp 14,362	Rp 14,749	Rp 15,297	Rp 16,420	Rp 15,811	Rp 15,789	Rp 16,114
Halmahera Selatan	Rp 12,887	Rp 13,479	Rp 13,939	Rp 14,493	Rp 16,537	Rp 18,765	Rp 21,034	Rp 23,118	Rp 25,981	Rp 31,019
Halmahera Utara	Rp 16,364	Rp 17,141	Rp 17,882	Rp 18,248	Rp 19,091	Rp 19,199	Rp 19,719	Rp 18,966	Rp 19,297	Rp 19,734
Halmahera Timur	Rp 23,123	Rp 20,287	Rp 20,952	Rp 21,478	Rp 22,407	Rp 23,534	Rp 24,533	Rp 25,133	Rp 26,921	Rp 26,791
Pulau Morotai	Rp 12,659	Rp 13,094	Rp 13,525	Rp 13,987	Rp 14,487	Rp 15,085	Rp 15,619	Rp 14,229	Rp 14,138	Rp 14,172
Pulau Taliabu	Rp 13,120	Rp 13,739	Rp 14,328	Rp 14,964	Rp 15,571	Rp 17,257	Rp 18,622	Rp 17,211	Rp 19,166	Rp 19,590
Ternate	Rp 22,480	Rp 23,853	Rp 25,152	Rp 26,535	Rp 27,889	Rp 29,532	Rp 31,534	Rp 34,922	Rp 35,666	Rp 37,406
Tidore Kepulauan	Rp 15,064	Rp 15,772	Rp 16,533	Rp 17,180	Rp 18,003	Rp 18,884	Rp 20,125	Rp 17,831	Rp 17,736	Rp 17,959
Maluku Utara	Rp 16,332	Rp 16,870	Rp 17,534	Rp 18,177	Rp 19,193	Rp 20,310	Rp 21,525	Rp 21,915	Rp 25,200	Rp 30,507

Sumber : BPS Maluku Utara 2024

Data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari tahun 2013 hingga 2022, terlihat adanya variasi yang signifikan antara daerah-daerah di provinsi tersebut. Terlihat bahwa ada trend peningkatan yang cukup stabil pada beberapa daerah seperti Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, dan Ternate, meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Namun, ada juga daerah yang mengalami

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

lonjakan yang signifikan, seperti Halmahera Tengah yang mencatatkan kenaikan yang luar biasa dari tahun 2020 hingga 2022. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Tidore Kepulauan dan Halmahera Utara menunjukkan trend yang kurang stabil dengan fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kesimpulannya, sementara Maluku Utara secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dalam PDRB per kapita selama periode yang diamati, variasi yang signifikan antara daerah menyoroti perlunya penilaian yang lebih terperinci untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.

Tabel 1.2 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) Provinsi Maluku Utara

Wilayah	Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) Provinsi Maluku Utara									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Halmahera Barat	10484.8	10850	11256.2	11622.8	114502	116513	118287	132349	134630	137541
Halmahera Tengah	23541.7	22456.8	22776.5	24593	52813	54190	55728	56802	57809	59096
Kepulauan Sula	12928.1	13422.4	13935.3	14361.9	99196	100967	102886	104082	105293	106778
Halmahera Selatan	12887	13478.5	13938.8	14492.8	227280	231217	235090	248395	251690	255795
Halmahera Utara	16363.8	17140.6	17881.6	18247.7	187104	190531	193851	197638	199936	202755
Halmahera Timur	23122.7	20287.1	20952.4	21477.6	90070	92618	95005	91707	92954	94510
Pulau Morotai	12659.1	13093.7	13524.8	13986.9	64001	65573	67284	74436	76102	78270
Pulau Taliabu	13120.2	13739	14327.5	14963.9	51928	52503	53018	58047	58744	59601
Ternate	22480.4	23853.4	25152.1	26535.3	223111	228105	233208	205001	205870	206745
Tidore Kepulauan	15063.9	15772.3	16532.5	17179.6	99337	100415	101414	114480	116149	118247
Maluku Utara	16332.2	16869.5	17533.8	18177.3	1209342	1232632	1255771	1282937	1299177	1319338

Sumber :BPS Maluku Utara 2024

Data Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2013 hingga 2022, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan dalam jumlah penduduk di berbagai wilayah. Beberapa daerah, seperti Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Pulau Taliabu, menunjukkan peningkatan yang cukup stabil dalam jumlah penduduk selama periode tersebut. Namun, terdapat juga daerah-daerah yang mencatat lonjakan yang signifikan, seperti Halmahera Barat yang mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup drastis dari tahun 2017 hingga 2022. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Halmahera Timur dan Ternate menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dalam jumlah penduduk, yang mungkin mencerminkan faktor-faktor seperti migrasi atau kebijakan demografis yang berbeda di setiap daerah. Kesimpulannya, sementara Maluku Utara secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dalam jumlah penduduk selama periode yang diamati, variasi yang signifikan antara daerah menyoroti perlunya perencanaan yang cermat dalam menghadapi tantangan demografis dan sosial di masing-masing wilayah.

Ketimpangan pembangunan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang hati-hati. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga dapat memicu krisis yang lebih kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Ketimpangan pembangunan dapat menyebabkan masalah kependudukan, seperti urbanisasi yang tidak terkendali atau migrasi besar-besaran, serta berdampak pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Misalnya, ketimpangan ekonomi dapat memicu ketegangan sosial dan konflik politik, sedangkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya alam dapat mengancam keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut, ketimpangan pembangunan juga berdampak negatif secara makro terhadap proses dan hasil pembangunan yang diinginkan oleh suatu wilayah, menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan ketimpangan pembangunan harus menjadi prioritas utama dalam upaya mempromosikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Ketimpangan pembangunan adalah sebuah masalah yang telah ada sejak lama dan sering dihadapi oleh semua negara, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan, maupun secara global (Firdaus, 2013). Isu mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi dapat terjadi di negara-negara maju, negara berkembang, maupun negara yang tertinggal. Hal ini

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

disebabkan oleh perbedaan dalam ketersediaan sumber daya alam dan keadaan demografis di setiap negara. Sebagai akibatnya, daerah yang kaya akan sumber daya alam cenderung lebih maju dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya yang terbatas. Berdasarkan urain diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah kabupaten dan kota Di Provinsi Maluku Utara. adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perkembangan pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah terdapat Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Maluku Utara selama 10 tahun terakhir (2015 - 2022) berdasarkan data PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah Provinsi Maluku Utara?
3. Apakah terdapat hipotesis Kuznets tentang "U terbalik" berlaku di Maluku Utara?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih,2014:92).

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Sadono, 2002) Mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi disuatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbahan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barangbarang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tembuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007:57).

2.4 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari sisi vertikal maupun horizontal. Adanya ketimpangan pembangunan vertikal dapat dilihat dari perbedaan distribusi pendapatan. Sementara ketimpangan pembangunan secara horizontal, dapat dilihat dari adanya negara maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008). Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan vertikal adalah indeks gini. Sementara alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis ketimpangan horizontal adalah Indeks Williamson (Mopangga, 2014). Hal tersebut dikarenakan indeks gini menganalisis kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan basis data jumlah penduduk dan total pengeluaran atau pendapatan dari masyarakat. Sementara pada Indeks Williamson membandingkan tingkat kemakmuran antar wilayah melalui pendekatan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, basis data analisis Indeks Williamson adalah PDRB atau PDRB per kapita dan jumlah penduduk dari daerah yang diamati (Mopangga, 2014).

2.5 Ketimpangan Pendapatan

Simone Kuznets (2019) menyatakan ketimpangan ekonomi akan meningkat ketika proses pembangunan ekonomi tersebut mulai dilakukan hingga mencapai titik tertentu kemudian akan berkurang ketika proses pembangunan ekonomi tersebut telah mencapai tahap kedewasaan sehingga mulai terjadi pemerataan. Hipotesis Kuznets ini menyatakan bahwa kesenjangan akan muncul sebagai akibat dari pertumbuhan yang kemudian akan menurun seiring dengan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari hipotesis tersebut, Simone Kuznets membentuknya menjadi sebuah kurva, yang dikenal dengan kurva Kuznets "U-terbalik".

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ambar et al., (2021) yang menganalisis disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah, struktur pertumbuhan ekonomi, dan hubungan antara ketimpangan serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara pada periode 2015-2019. Data sekunder digunakan dengan analisis menggunakan Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Pearson Korelasi, serta perangkat lunak Microsoft Excel 2010 dan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Williamson di wilayah tersebut tergolong ketimpangan taraf rendah. Berdasarkan Tipologi Klassen, wilayah dibagi menjadi daerah maju dan tumbuh cepat (Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah), maju tapi tertekan (Kabupaten Halmahera Timur), cepat berkembang tapi tidak maju (Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepulauan Taliabu), serta relatif tertinggal (Kabupaten Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Kota Tidore). Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sebesar -0,379 menunjukkan hubungan negatif, namun tidak signifikan ($p = 0,529$).

Penelitian oleh Hadju et al., (2021) yang menganalisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tujuan utama pembangunan, kenyataannya hal ini sering disertai ketimpangan pembangunan antar daerah. Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh perbedaan kepemilikan sumber daya, faktor produksi, dan barang modal, yang bervariasi berdasarkan karakteristik wilayah. Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa wilayah tumbuh pesat, sementara yang lain lambat, sehingga memperbesar ketimpangan pembangunan dan pendapatan. Penelitian menggunakan data sekunder dari BPS Sulut dan dianalisis dengan Indeks Williamson, menunjukkan ketimpangan tinggi dengan nilai 0,5.

Penelitian oleh Bawowo et al., (2022) jurnal penelitian ini kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian. Faktor penyebab kemiskinan yaitu harga kebutuhan tinggi, lapangan kerja terbatas, malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, pendidikan yang rendah. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dengan periode pengamatan yaitu tahun 2011-2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah eviews10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian oleh Koagow et al., (2022) yang menganalisis disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di Sulawesi Utara pada periode 2011–2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtut waktu, dianalisis dengan Indeks Williamson dan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Sulawesi Utara berada pada kategori menengah. Terdapat hubungan negatif yang lemah antara disparitas pembangunan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), di mana peningkatan investasi PMA dan PMDN cenderung menurunkan disparitas. Namun, secara statistik, hubungan tersebut tidak signifikan.

Penelitian dari Lukita (2023) Jurnal *determinants of Development Inequality in Eastern* Indonesia Permasalahan ketimpangan pembangunan daerah merupakan permasalahan sejarah yang dihadapi oleh setiap negara. Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan adalah dengan mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi ketimpangan pembangunan di Indonesia bagian timur dengan menggunakan lima variabel independen yaitu indeks biaya konstruksi, investasi, rata-rata lama sekolah, pendapatan asli daerah, dan luas tutupan lahan hutan. Metode penelitian ini menggunakan analisis indeks Williamson dan regresi data panel. Random *Effect Model (REM)* merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel dalam penelitian ini. Hasil kajian indeks menunjukkan bahwa Williamson untuk Indonesia bagian timur mempunyai nilai sebesar 0,49 yang berarti ketimpangan sedang. Hasil analisis REM

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menunjukkan bahwa investasi, pendapatan asli daerah, dan tutupan lahan hutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan perkembangan.

2.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka skema dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Berpikir

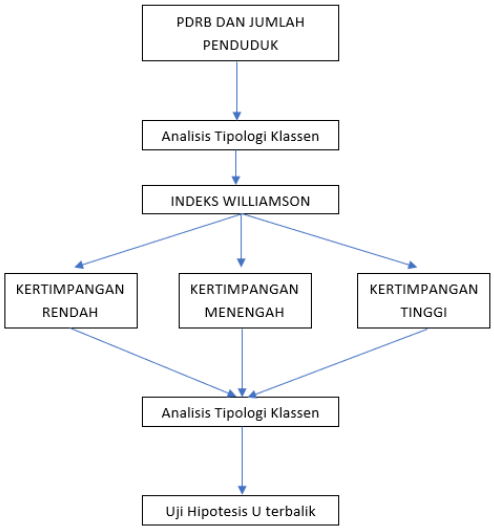

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2024)

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk. Mengetahui disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di Provinsi Maluku Utara.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dari hasil wawancara atau kuesioner dilapangan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. PDRB Provinsi Maluku Utara ada dalam total PDRB menurut Pendapatan perkapita dalam Triliun Rupiah Atas Dasar Harga Konstan 2010.
2. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara dalam Jumlah Penduduk dalam jiwa.

Metode Analisis Data

a. Analisis Tipologi Klassen
   Analisis Tipologi Klassen adalah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif. Tipologi ini membagi wilayah menjadi empat kategori: (1) daerah maju dan tumbuh cepat, yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita tinggi; (2) daerah maju tetapi tertekan, yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun pertumbuhan ekonominya rendah; (3) daerah cepat berkembang tapi tidak maju, yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pendapatan per kapita rendah; dan (4) daerah relatif tertinggal, yang memiliki baik pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita yang rendah. Dengan menggunakan klasifikasi ini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi setiap wilayah, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
b. Analisis Indeks Williamson
   Indeks Williamson adalah alat yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah atau wilayah di seluruh negara. Nilai 0 pada indeks menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan semua wilayah memiliki pendapatan yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

sama sementara nilai 1 menunjukkan bahwa ada ketimpangan. Efek kebijakan pembangunan dan perbedaan pembangunan ekonomi antar wilayah di seluruh negara atau provinsi biasanya dievaluasi dengan indeks ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

a. Analisis Tipologi Klassen

PDRB perkapita Laju Pertumbuhan	ydi > yni (+)	ydi < yni (-)
rdi > rni (+)	(I) Daerah maju dan tumbuh cepat	(II) Daerah berkembang cepat tapi tidak maju: Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Pulau Morotai Pulau Taliabu Ternate Tidore Kepulauan
rdi < rni (-)	(III) Daerah maju tapi tertekan	(IV) Daerah relatif tertinggal

Sumber : data Setelah Diolah

Provinsi Maluku Utara dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok berdasarkan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan. Daerah maju dan tumbuh cepat (I) memiliki PDRB dan pertumbuhan di atas rata-rata nasional (rdi > rni, ydi > yni). Daerah berkembang cepat tapi tidak maju (II) menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi namun PDRB masih di bawah rata-rata nasional (rdi > rni, ydi < yni), termasuk Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Ternate, dan Tidore Kepulauan. Daerah maju tapi tertekan (III) memiliki PDRB tinggi tetapi pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional (rdi < rni, ydi > yni). Sementara itu, daerah relatif tertinggal (IV) memiliki PDRB dan laju pertumbuhan di bawah rata-rata nasional (rdi < rni, ydi < yni).

b. Analisis Indeks Williamson

Tahun	Indeks WL	keterangan
2013	0.27613	Ketimpangan taraf rendah
2014	0.26617	Ketimpangan taraf rendah
2015	0.27227	Ketimpangan taraf rendah
2016	0.28120	Ketimpangan taraf rendah
2017	0.27631	Ketimpangan taraf rendah
2018	0.27577	Ketimpangan taraf rendah
2019	0.28075	Ketimpangan taraf rendah
2020	0.33055	Ketimpangan taraf menengah
2021	0.58269	Ketimpangan taraf tinggi
2022	0.90966	Ketimpangan taraf tinggi

Sumber : data Setelah Diolah,2024

Data indeks ketimpangan (WL) di Provinsi Maluku Utara menunjukkan trend peningkatan ketimpangan dari tahun 2013 hingga 2022. Dari tahun 2013 hingga 2019, ketimpangan berada pada taraf rendah dengan indeks berkisar antara 0.26617 hingga 0.28120. Namun, pada tahun 2020, ketimpangan meningkat ke taraf menengah dengan indeks 0.33055. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2021 dan 2022, dengan indeks masing-masing sebesar 0.58269 dan 0.90966, menunjukkan ketimpangan taraf tinggi.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pembahasan Hasil

Analisis Tipologi Klassen mengelompokkan wilayah di Provinsi Maluku Utara berdasarkan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, menghasilkan empat kategori utama. Kategori pertama adalah daerah maju dan tumbuh cepat, yang memiliki PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, menandakan wilayah yang sejahtera dan berkembang pesat. Kategori kedua adalah daerah berkembang cepat tapi tidak maju, yang mencakup wilayah seperti Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan lainnya. Meskipun wilayah ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tinggi, PDRB per kapita mereka masih di bawah rata-rata nasional, menunjukkan bahwa mereka dalam fase perkembangan namun belum mencapai tingkat kemakmuran yang optimal.

Data Indeks Ketimpangan Williamson (WL) di Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan ketimpangan yang signifikan dari tahun 2013 hingga 2022. Pada periode 2013–2019, indeks ketimpangan berada pada taraf rendah, namun pada tahun 2020, terjadi lonjakan ketimpangan dengan indeks mencapai 0.33055, masuk dalam kategori ketimpangan taraf menengah. Pada tahun 2021 dan 2022, ketimpangan meningkat tajam ke taraf tinggi, dengan indeks mencapai 0.58269 dan 0.90966, menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

Hasil analisis korelasi antara Indeks Williamson dan PDRB Per Kapita menunjukkan hubungan negatif yang kuat, dengan koefisien korelasi Pearson sebesar -0.964. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB Per Kapita berhubungan erat dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Model regresi menunjukkan adanya hubungan negatif antara PDRB Per Kapita dan Indeks Williamson, dengan koefisien $\beta 1$ sebesar -0.196. Meskipun ada indikasi kurva "U-terbalik" dalam analisis regresi, data tidak sepenuhnya mendukung hipotesis Kuznets, yang menyatakan bahwa ketimpangan akan meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun di tahap selanjutnya. Sebaliknya, di Provinsi Maluku Utara, peningkatan PDRB Per Kapita cenderung mengurangi ketimpangan tanpa melalui fase peningkatan ketimpangan yang signifikan.

5. PENUTUP

Analisis Tipologi Klassen mengelompokkan wilayah di Provinsi Maluku Utara berdasarkan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, menghasilkan empat kategori utama. Kategori pertama adalah daerah maju dan tumbuh cepat, yang menunjukkan kesejahteraan dan perkembangan pesat dengan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Kategori kedua mencakup daerah berkembang cepat tapi tidak maju, seperti Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan lainnya, yang meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, PDRB per kapitanya masih di bawah rata-rata nasional, mencerminkan fase perkembangan yang belum mencapai kemakmuran optimal. Data Indeks Ketimpangan Williamson (WL) menunjukkan peningkatan ketimpangan signifikan di Provinsi Maluku Utara dari 2013 hingga 2022. Ketimpangan berada pada taraf rendah hingga 2019, namun meningkat menjadi taraf menengah pada 2020 dan mencapai taraf tinggi pada 2021-2022, mengindikasikan konsentrasi pendapatan di segelintir penduduk. Analisis korelasi antara Indeks Williamson dan PDRB Per Kapita menunjukkan hubungan negatif yang kuat, dengan koefisien korelasi -0.964, yang berarti peningkatan PDRB Per Kapita berhubungan dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Model regresi yang dihasilkan juga tidak sepenuhnya mendukung hipotesis Kuznets "U-terbalik", menunjukkan bahwa di Maluku Utara, peningkatan PDRB Per Kapita lebih konsisten mengurangi ketimpangan tanpa melalui fase peningkatan ketimpangan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu fokus pada peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan publik di daerah berkembang cepat tapi tidak maju, serta mendukung kebijakan yang inklusif untuk sektor ekonomi lokal, pengembangan UKM, pasar lokal, dan inovasi teknologi guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 10 No 2 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR PUSTAKA

Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *21*(1).

Bawowo, I. J., Kalangi, J. B., & Masloman, I. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *22*(7), 85–96.

Firdaus, M. (2013). *Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia: fakta dan strategi inisiatif*.

Firmansyah, F. (2021). Analisis Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor Pertanian Di Wilayah Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena: Penelitian Dan Penalaran*, *8*(1), 115–129.

Hadju, I. I., Masinambow, V. A. J., & Maramis, M. T. B. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *21*(1).

Jhingan, M. L. (2000). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*.

Koagow, Y. Y., Walewangko, E. N., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Dengan Investasi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *22*(5), 1–12.

Kuznets, S. (2019). Economic growth and income inequality. In *The gap between rich and poor* (pp. 25–37). Routledge.

Listyaningsih. (2014). *Administrasi pembangunan: pendekatan konsep dan implementasi*. Graha Ilmu. https://books.google.co.id/books?id=F5r1oAEACAAJ

Lukita, E. S. (2023). Determinants of Development Inequality in Eastern Indonesia. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, *1*, 1832–1841.

Mopangga, H. (2014). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika Journal*, *10*(1), 40–51.

Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.

Sadono, S. (2002). Pengantar Teori Makroekonomi, edisi kedua. *Rajawali Pers, Jakarta*.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Macroeconomics*. McGraw-Hill Irwin. https://books.google.co.id/books?id=WVJRPgAACAAJ

Sjafrizal, E. (2008). *Ekonomi Regional, Teori Danaplikasi. Baduose Media, Praninta Offset*. Padang Sumateru Barat, Pandang.